

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Kunjungan Kerja Parlemen Jakarta Diperketat

Anggota DPRD wajib mempublikasikan seluruh rangkaian dan hasil perjalanan dinas.

Francisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta menyelesaikan draf peraturan tentang Tata Tertib Anggota Parlemen Jakarta periode 2019-2024. Satu isu yang tak lolos dalam pembahasan adalah pembatasan jumlah kunjungan kerja. Menurut politikus Partai Solidaritas Indonesia, Justin Adrian, semua fraksi di DPRD menolak usul pembatasan tersebut. “Mereka menilai tak usah ada pembatasan, tapi bikin aturan untuk memperketat saja,” kata Justin, kemarin.

Berdasarkan dokumen yang diterima *Tempo*, aturan tentang kunjungan kerja atau perjalanan dinas itu hanya mendapat

“Berdasarkan informasi yang diterima PSI, kunjungan kerja itu bisa terjadi setiap beberapa minggu. Biayanya bisa Rp 12 juta per anggota untuk kegiatan tiga hari.”

Justin Adrian
Politikus Partai Solidaritas Indonesia.

tambahan satu ayat baru. Aturan tersebut tercantum dalam Bab ke-18 tentang Ketentuan Lain-lain, terutama Pasal 183. Pada draf tata tertib, pasal tersebut mendapat tambahan ayat ke-3, yang mewajibkan anggota DPRD mempublikasikan seluruh rangkaian dan hasil perjalanan dinas.

“Jadi, nantinya masyarakat bisa tahu siapa saja yang berangkat kunjungan kerja. Lalu ke mana, berapa lama di sana, tujuannya apa, dan hasilnya bagaimana,” kata Justin.

Penambahan ayat tersebut, kata Justin, menjadi solusi atas perdebatan tentang pengurangan jumlah kunjungan kerja anggota DPRD. PSI mengajukan usul pembatasan itu agar ada peningkatan kualitas kerja legislasi DPRD Jakarta.

Pada periode sebelumnya, dalam kurun lima tahun, DPRD hanya mampu menghasilkan 42 dari 136 peraturan daerah yang masuk program pembentukan perda. Padahal, berdasarkan data kegiatan di Sekretariat DPRD, anggaran perjalanan dinas terus meningkat.

Menurut dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2017, nominal kegiatan kunjungan kerja DPRD mencapai Rp 162,6 miliar. Angka itu bertambah menjadi Rp 346,5 miliar pada tahun berikutnya. Sementara itu, dalam APBDP 2019 tercatat penurunan tipis menjadi Rp 307,79 miliar.

“Berdasarkan informasi yang diterima PSI, kunjungan kerja itu bisa terjadi setiap beberapa minggu.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Kunjungan Kerja Parlemen Jakarta Diperketat

Biayanya bisa Rp 12 juta per anggota untuk kegiatan tiga hari,” ujar Justin.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Dany Anwar, menilai kunjungan kerja DPRD memang perlu dievaluasi, tapi tidak harus dibatasi. Perbaikan kualitas kinerja DPRD bisa dipertanggungjawabkan dengan transparansi setiap perjalanan dinas. “Kunjungan dinas tetap diperlukan agar Dewan tidak *kuper* (kurang pergaulan),” ujar dia.

Ketua DPRD sementara, Pantas Nainggolan, mengatakan tata tertib tersebut juga memasukkan aturan baru tentang pembentukan panitia khusus yang akan membantupercepatanpembahasan rancangan perda di Badan Pembentukan Peraturan Daerah. “Nanti (perda) prosesnya lebih ringkas tapi tetap berkualitas,” kata Pantas.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan DPRD periode 2019-2024 harus memperbaiki kualitas kinerja untuk meningkat-

kan produktivitas legislasi. Menurut dia, salah satu penyebab lambatnya proses pembahasan adalah keterbatasan kehadiran anggota Dewan dalam rapat.

“Alokasi waktunya bagaimana? Masa sidangnya bagaimana? Berapa hari di Jakarta dan berapa hari kunjungan kerja?” kata Anies.

Sekretaris DPRD Jakarta, Yuliadi, mengatakan anggaran perjalanan dinas akan dikurangi dari sepuluh menjadi dua tujuan pada 2020. Dengan demikian, secara keseluruhan, anggaran kerja Sekretariat DPRD berkurang 35 persen dibanding anggaran pada APBD 2019 yang mencapai Rp 307,79 miliar.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2020, menurut Yuliadi, anggaran kerja Sekretariat DPRD hanya Rp 232,68 miliar atau berkurang Rp 75,11 miliar. “Sebagian besar pengurangan anggaran adalah perjalanan dinas,” kata dia.

● IMAM HAMDI

Naik-Turun Anggaran Dinas

PEMERINTAH Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta bersepakat mengurangi anggaran kerja Sekretariat DPRD dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Niatnya, DPRD bisa lebih banyak berada di Ibu Kota untuk menuntaskan pembahasan semua rancangan peraturan daerah.

Anggaran Kerja Sekretariat DPRD

APBDP 2017: **Rp 162,6** miliar
APBDP 2018: **Rp 346,5** miliar
APBDP 2019: **Rp 307,79** miliar
KUA-PPAS 2020: **Rp 232,68** miliar

Anggaran dipangkas

■ **Perjalanan pembahasan Bapemperda**
APBDP 2019: **Rp 76,05** miliar
KUA-PPAS 2020: **Rp 26,34** miliar

■ **Pembahasan Badan Anggaran**
APBDP 2019: **Rp 10,84** miliar
KUA-PPAS 2020: **Rp 2,89** miliar

■ **Pembahasan panitia khusus dan kepanitiaan lainnya**
APBDP 2019: **Rp 27,32** miliar
KUA-PPAS 2020: **Rp 6,88** miliar

■ **Pembahasan Badan Musyawarah**
APBDP 2019: **Rp 9,59** miliar
KUA-PPAS 2020: **Rp 2,64** miliar

■ **Pembahasan Badan Kehormatan**
APBDP 2019: **Rp 2,25** miliar
KUA-PPAS 2020: **Rp 0,71** miliar

■ **Kunjungan kerja komisi**
APBDP 2019: **Rp 65,41** miliar
KUA-PPAS 2020: **Rp 20,82** miliar

■ **Pelaksanaan reses legislator**
APBDP 2019: **Rp 64,94** miliar
KUA-PPAS 2020: **Rp 97,99** miliar